

teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan demikian perubahan dipandang sebagai proses adaptasi dan penyesuaian, dan tumbuh bersama dengan differensiasi dan inovasi yang diintegrasikan melalui pemilikan nilai-nilai yang sama.² Relasi sosial dapat berbentuk relasi yang bersifat asosiatif maupun dissosiatif. Interaksi yang asosiatif adalah hubungan sosial dalam masyarakat yang terwujud dari adanya kehendak rasional antarelemen masyarakat, dalam pengertian segala hal yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Proses ini mengarah pada semakin kuatnya ikatan antara pihak-pihak yang berhubungan. Proses ini meliputi bentuk kerjasama dan akomodasi. Di sisi lain, interaksi dissosiatif merupakan bentuk hubungan sosial yang mengarah pada perpecahan atau merenggangnya hubungan sosial antarpihak yang saling berhubungan. Proses ini dapat berbentuk persaingan, kontravensi, maupun pertentangan.³

Relasi sosial ini juga terkait dengan karakteristik sosial dari bentuk-bentuk konfigurasi sosial masyarakat dalam bentuk identitas sosial. Menurut Jenkin,⁴ identitas sosial merupakan konsep tentang siapa seseorang atau kelompok orang dikenali oleh orang atau kelompok lain, atau juga mengenai seseorang dikenali dalam kelompoknya sendiri. Dengan demikian identitas sosial merupakan ciri-ciri kelompok yang membedakan dengan kelompok lain,

² Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, jurnal Smart "Tradisi Kerukunan, antara wacana dan implementasi kebijakan Vol. 01 No. 01, 1992), 25.

³ Soekanto, Suryono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo, Edisi baru ke-4. Cetakan 20, 1982) 71.

⁴ Jamil, M.Muhsin, *Dinamika Identitas dan Strategi Adaptasi Minoritas Syi'ah di Jepara*, (Semarang : PPS IAIN Walisongo, 2012)

untuk tidak mentaati pemerintah. Negara Kesatuan Republik Indonesia memang bukan negara agama, artinya negara tidak mendasarkan kehidupan kenegaraannya pada salah satu agama atau theokratis. Tetapi, pemerintah berkewajiban melayani dan menyediakan kemudahan-kemudahan bagi agama-agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha serta memikul tugas kerukunan hidup umat beragama.¹⁹

Pada buku Pedoman Dasar Kehidupan Beragama tahun 1985-1986 Bab IV halaman 49 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Kerukunan hidup beragama adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri.
- 2). Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan pertama, menanamkan pengertian akan nilai kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama. Kedua, mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup beragama. Ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama.
- 3). Kondisi umat beragama di Indonesia. Pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama dimaksudkan agar umat beragama mampu menjadi subjek

¹⁹ Agus Saputera, *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=499> diakses pada tanggal 12 Mei 2016 pukul 20.00 WIB.

Semua agama mempunyai kecemasan terhadap tantangan humanis sekuler demi kesatuan umat manusia, sebab adanya kekhawatiran jika kerangka sekuler dapat mendominasi, maka agama akan lebih termarginalkan sebagaimana yang telah terjadi sekarang ini. Dan mereka sendiri enggan menggunakan bentuk kerangka sekuler semacam ini.

Bagi masyarakat Indonesia, apa yang dikatakan sebelumnya bukanlah sesuatu yang asing, karena negara kita didasarkan pada Pancasila, satu paradigma baru yang menghubungkan antara agama dan negara, dimana Indonesia bukan negara sekuler dan teokrasi. Persoalannya hanya terletak pada penerapan Pancasila sebagai landasan kehidupan sosial dan negara. Kepercayaan terhadap Ke-Esaan Tuhan menjadi penerang masyarakat Indonesia dalam perilaku sosial dan negara mereka.

Ada beberapa pemikiran Mukti Ali yang diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama, yaitu : pertama, pendapat dengan jalan sinkretisme bahwa pada dasarnya semua agama itu adalah sama. Sinkretisme ini merupakan tindak laku harus dilihat sebagai wujud dan manifestasi dari Keberadaan Asli (zat), sebagai pancaran dari Terang Asli yang satu, sebagai ungkapan dari Substansi yang satu, dan sebagai ombak dari Samudera yang satu. Ilmu agama ialah berbagai aliran dan gejala-gejala yang hendak membaurkan semua agama menjadi satu. Dan yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Kedua, dengan jalan reconception, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. Pandangan ini menawarkan pemikiran bahwa orang harus menyelami

menimbulkan kerukunan hidup antar umat beragama. Sebab orang yang beragama harus yakin bahwa agama yang dianut itulah agama yang paling baik dan benar. Jika tidak, dengan keyakinan bahwa agama yang ia peluk adalah agama yang paling benar maka, timbullah kegairahan untuk berusaha supaya tindak laku lahiriah sesuai dengan ucapan batinnya, yang merupakan dorongan agama yang dianut. Selain itu harus diakui bahwa disamping perbedaan yang terdapat diantara yang dianut dengan agama lain, masih terdapat persamaan-persamaan. Berdasarkan pengertian inilah saling hormat-menghormati dan saling menghargai ditimbulkan sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama.⁴¹ Pandangannya ini dari kesadaran akan pluralitas agama dan budaya di Indonesia, dilandasi dengan pemahamannya yang mendalam terhadap teks-teks fundamental dalam Islam, dan tentunya juga semangat pembaruan yang telah dimilikinya sejak menimba ilmu di negeri orang.⁴² Selanjutnya umat beragama merasa satu dengan lainnya sebagai saudara dan saling membantu. Umat beragama yang satu menghormati dan menghargai keberadaan umat beragama lain, saling tidak mencurigai dan tidak saling menyalahkan. Kondisi hidup yang rukun berarti kondisi hidup yang jauh dari permusuhan, perselisihan, dan persengketaan serta saling membantu, saling menghormati dan saling kerja sama.

⁴¹ Depag RI, *Hasil Masyarakat Antar Umat Beragama* "Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama", (Jakarta: 1981-1982),, 212-213.

⁴² Didik Andriawan, H.A. Mukti Ali, <http://pasaronlineforall.blogspot.co.id/2010/12/h-mukti-ali.html> diakses pada tanggal 21 Desember 2010.